

**BAB V**  
**PENUTUP**

**A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian yang dilakukan di kantor Pejabat pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Gempol – Pasuruan adalah sebagai berikut:

1. Instansi Pejabat pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Gempol – Pasuruan bertindak sebagai pemberi dana kepada pihak yang berhak dan sebagai fungsi akuntansi yang mencatat transaksi pengeluaran kas negara dalam kegiatan pemberian uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Gempol – Pasuruan.
2. Sistem informasi akuntansi pengeluaran kas pada kegiatan pemberian uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Gempol – Pasuruan yang dijalankan masih lemah. Hal ini disebabkan karena kurang maksimalnya fungsi pemeriksa intern sehingga terdapat beberapa dokumen yang dinyatakan belum lengkap oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terjadi perangkapan personil pada jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3. Hasil analisis deskriptif kualitatif dengan melakukan:
  - a. Usulan penambahan bagian tim verifikator internal yang bertugas untuk memeriksa dan melengkapi dokumen sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

- b. Usulan penambahan karyawan pada jabatan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada instansi Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Gempol – Pasuruan.
- c. Usulan perbaikan sistem dan prosedur pengeluaran kas pemberian uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Gempol – Pasuruan.

**B. Saran**

1. Pejabat Pembuat Komitmen sebaiknya membentuk tim verifikator internal guna memeriksa dan melengkapi dokumen kegiatan pemberian uang ganti kerugian sebelum di periksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sehingga dana talangan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) kepada Badan Usaha (BU) dapat *direimburse* secara maksimal.
2. Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Gempol – Pasuruan hendaknya mengajukan kepada satuan kerja untuk penambahan sumber daya manusia agar tidak terjadi rangkap personil Kepala Urusan Tata Usaha dan Bendahara Pengeluaran Pembantu.
3. Usulan perbaikan sistem dan prosedur pengeluaran kas pemberian uang ganti kerugian pengadaan tanah jalan tol Gempol – Pasuruan agar dapat dipertimbangkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Amin Widjaja Tunggal. 2000. *COSO - Based Auditing*. Jakarta: Harvindo.
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J., dan Beasley, Mark S.. 2014. *Auditing dan Jasa Assurance*. Edisi kelima belas jilid 1. Jakarta: Erlangga.
- Baridwan, Zaki. 1997. *Sistem Informasi Akuntansi. Edisi Dua*. Yogyakarta: BPFE.
- Bodnar, George H & William, S. Hopwood. 2006. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Andi.
- Diana, A., dan Setiawati, L. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi, Perancangan, Prosedur dan Penerapan. Edisi Satu*. Yogyakarta: Andi.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardi. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi*. Bogor: Ghalia.
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nobel, Alfred dan Larasati, Nabila Putri. 2017. *Inovasi Pembiayaan Tanah untuk Proyek Jalan Tol*. Jurnal HPJI Vol. 3 No. 2 Juli 2017: 139-148. Universitas Katolik Parahyangan. <http://journal.unpar.ac.id/index.php/HPJI/article/download/2741/2346>. Diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Nugroho, Tomi. 2012. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Studi Kasus Proyek Peningkatan Jalan dan Jembatan Kota Administrasi Jakarta Utara*. Skripsi. Universitas Indonesia. <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20318111-S-Tomi%20Nugroho.pdf>. Diakses tanggal 22 Januari 2019.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2017 tentang *Tata Cara Pendanaan Pengadaan Tanah Bagi Proyek Strategis Nasional Dan Pengelolaan Aset Hasil Pengadaan Tanah Oleh Lembaga Manajemen Aset Negara*.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang *Penetapan dan Tata Cara Penggunaan Dana Talangan Badan Usaha Untuk Pengadaan Tanah Jalan Tol*.
- Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2008 tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Rahayu, Siti dan Devitra, Joni. 2017. *Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Kas pada Satker PSP.TP Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi*. Jurnal Manajemen Sistem Informasi Vol. 2, No. 1, Maret 2017. Stikom Dinamika Bangsa Jambi. <http://ejournal.stikom-db.ac.id/index.php/manajemensisteminformasi/article/view/445>. Diakses tanggal 21 Januari 2019.

- Setiawati, L. 2011. *Sistem Informasi Akuntansi (Perancangan, Proses, dan Penerapan)*. Yogyakarta: Andi.
- Soemarso, S.R. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 664/KPTS/M/2014 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 157/KPTS/M/2018 tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I dan Wilayah II di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Swasti, Elisabeth Kanthi. 2017. *Evaluasi Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas Studi Kasus di Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*. Skripsi. Universitas Sanata Dharma. [http://repository.usd.ac.id/11769/2/132114003\\_full.pdf](http://repository.usd.ac.id/11769/2/132114003_full.pdf). Diakses tanggal 22 Januari 2019.
- Tenda Stefy Hendy, Ilat Ventje, dan Walandouw Stanley Kho. 2015. *Analisis Sistem Informasi Akuntansi Pengeluaran Kas pada Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Volume 15 No. 05 Tahun 2015. Universitas Sam Ratulangi. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/download/10507/10095>. Diakses tanggal 21 Januari 2019.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.